



Collaborative Governance Program PKBM Sekolah Kesetaraan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA Payakumbuh

Ahmad Hizbullah¹, Karisadini²

Program Studi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: ahizbullah94@gmail.com, karisadn@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 26 September 2025

ABSTRACT

Education is a fundamental right for every child, including those in juvenile correctional institutions. This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in the Community Learning Center (PKBM) Equivalency Program at LPKA Payakumbuh to ensure the educational rights of juvenile inmates. Employing a qualitative descriptive method, data were obtained through observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings indicate that collaboration between LPKA and PKBM Genemail provides access to equivalency education packages A, B, and C, enabling inmates to continue learning despite being isolated from formal schools. However, challenges such as low learning motivation, administrative barriers in the education database, and limited financial support hinder optimal outcomes. The study implies that collaborative governance involving government, educational institutions, and community participation is essential to guarantee inclusive and sustainable education for marginalized children.

Keywords: *Collaborative Governance, PKBM, Equivalency School, Juvenile Inmates*

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak mendasar bagi setiap anak, termasuk mereka yang berada di lembaga pembinaan khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam Program PKBM Sekolah Kesetaraan di LPKA Payakumbuh guna menjamin hak pendidikan anak binaan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara LPKA dan PKBM Genemail mampu menyediakan akses pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, sehingga anak binaan tetap dapat belajar meskipun terisolasi dari sekolah formal. Namun, hambatan berupa rendahnya motivasi belajar, kendala administratif dalam basis data pendidikan, serta keterbatasan dukungan finansial masih menjadi tantangan serius. Penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk menjamin pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi anak-anak marginal.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, PKBM, Sekolah Kesetaraan, Anak Binaan*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Indonesia sejak awal kemerdekaan telah menaruh perhatian besar pada bidang pendidikan, mulai dari program wajib belajar enam tahun, kemudian sembilan tahun, hingga kini menjadi minimal dua belas tahun. Upaya ini sejalan dengan cita-cita konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian, meskipun komitmen tersebut kuat, realitas di lapangan menunjukkan kualitas pendidikan nasional masih menghadapi tantangan serius. Data International Education Database (2025) menempatkan Indonesia pada peringkat 67 dunia, tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Susenas 2024 yang mencatat mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas hanya menamatkan pendidikan menengah, sedangkan lulusan perguruan tinggi baru mencapai 10,20 persen. Fenomena ini memperlihatkan bahwa misi peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan belum sepenuhnya optimal (OECD, 2022).

Pendidikan tidak hanya berfungsi mencetak generasi terdidik, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk mengurangi ketimpangan sosial, mencegah kriminalitas, dan membangun karakter bangsa. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa kesempurnaan hidup yang mencakup budi pekerti, pemikiran, dan watak dapat ditempuh melalui pendidikan. Rendahnya akses pendidikan berpotensi melahirkan krisis moral, terlebih di tengah arus globalisasi yang membawa budaya asing yang tidak selalu selaras dengan nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya diarahkan tidak hanya pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak mulia. Dalam perspektif internasional, UNESCO (2021) menekankan bahwa pendidikan harus menjamin inklusivitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan sebagai pondasi pembangunan sosial. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan harus dilihat sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk bagi kelompok marginal.

Hak memperoleh pendidikan juga mencakup anak-anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk mereka yang sedang menjalani masa binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa anak binaan memiliki hak memperoleh pendidikan sesuai kelompok umur sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan prinsip internasional seperti *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rules) yang menegaskan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari reintegrasi sosial anak. Dalam konteks Indonesia, program kejar paket dan pendidikan kesetaraan di bawah koordinasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi salah satu strategi untuk menjamin hak pendidikan anak binaan. Namun, implementasi program tersebut sering kali terhambat oleh keterbatasan fasilitas, tenaga pendidik profesional, maupun akses pada bahan ajar yang relevan dengan perkembangan zaman (UNICEF, 2022).

Untuk menjawab berbagai keterbatasan tersebut, pendekatan Collaborative Governance menjadi strategi penting yang mengedepankan sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Model kolaborasi ini terbukti efektif di berbagai negara dalam mengatasi persoalan pendidikan pada kelompok rentan. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa kolaborasi yang dibangun atas dasar kepercayaan, komunikasi terbuka, dan tujuan bersama akan menghasilkan inovasi serta keberlanjutan program. Dalam konteks lokal, LPKA Payakumbuh menjalin kerja sama dengan PKBM Genemail untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan bagi anak binaan melalui program Paket A, B, dan C. Melalui kolaborasi ini, anak binaan tidak hanya mendapatkan akses pada pendidikan formal setara, tetapi juga keterampilan hidup yang dapat mendukung kemandirian mereka di masa depan.

Kendati program ini berjalan dengan dukungan berbagai pihak, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya hambatan serius. Rendahnya motivasi belajar anak binaan, keterbatasan finansial, serta persepsi negatif sebagian orang tua menjadi tantangan yang mengurangi efektivitas implementasi program. Selain itu, keterbatasan sistem administrasi, misalnya terkait dengan data pokok pendidikan (Dapodik), menyebabkan sebagian anak binaan kesulitan memperoleh ijazah yang diakui secara nasional. Faktor psikososial, seperti lemahnya dukungan keluarga dan rendahnya interaksi emosional, semakin memperberat situasi. Dalam kerangka global, penelitian World Bank (2023) menekankan bahwa pendidikan bagi anak marginal akan berhasil apabila ada dukungan simultan dari faktor akademik, sosial, dan psikologis. Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan kesetaraan di LPKA harus dipandang sebagai proses multidimensi yang membutuhkan pendekatan menyeluruh.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, penting untuk menelaah bagaimana implementasi Collaborative Governance dalam penyelenggaraan program PKBM di LPKA Payakumbuh dapat mendukung pemenuhan hak pendidikan anak binaan. Kajian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan bentuk kerja sama yang terjalin, tetapi juga menganalisis efektivitas, hambatan, serta dampak dari kolaborasi tersebut terhadap anak binaan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi penguatan sinergi lintas lembaga, sekaligus memperkaya literatur tentang penerapan Collaborative Governance dalam konteks pendidikan anak binaan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Collaborative Governance dalam Program PKBM Sekolah Kesetaraan di LPKA Payakumbuh dalam rangka pemenuhan hak pendidikan anak binaan serta mengevaluasi dampak dan tantangan yang dihadapi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam implementasi Collaborative Governance dalam pemenuhan hak pendidikan anak binaan di LPKA Payakumbuh. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta analisis dokumen yang relevan untuk memperoleh gambaran

utuh mengenai fenomena yang diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan secara triangulasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, sedangkan analisis data mengikuti tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan tetap memperhatikan konteks sosial, budaya, dan institusional yang melingkupinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance Program PKBM Sekolah Kesetaraan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan Di LPKA Payakumbuh

Program Collaborative Governance antara LPKA Kelas II Payakumbuh dan PKBM Genemail dalam pemenuhan hak pendidikan anak binaan menekankan pentingnya pendidikan nonformal berupa sekolah kesetaraan paket A, B, dan C sebagai bagian dari pembinaan anak binaan agar tetap berkembang meski terisolasi dari lingkungan luar. Kolaborasi ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah anak binaan usia sekolah dan keterbatasan tenaga pendidik internal LPKA, dengan fasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kerja sama ini diatur melalui MoU resmi sejak 2023, menegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta dilaksanakan dengan prinsip transparansi, inklusivitas, dan komunikasi terbuka.

LPKA berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana, keamanan, dan pendampingan anak binaan, sedangkan PKBM Genemail bertanggung jawab pada aspek akademik, termasuk penyediaan guru, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan penerbitan rapor serta ijazah. Melalui forum rutin, dialog tatap muka formal dan informal, serta respons cepat terhadap kendala, kedua lembaga membangun kepercayaan, menjaga kontinuitas program, dan memperkuat kolaborasi. Insentif yang diperoleh LPKA mencakup pemenuhan hak pendidikan dan peningkatan citra institusi, sedangkan PKBM memperoleh dukungan operasional dari Dinas Pendidikan dan bantuan fleksibel dari LPKA. Dengan pembagian peran yang jelas, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif yang berkelanjutan, program sekolah kesetaraan ini berhasil memberikan pendidikan yang layak, membina karakter anak binaan, dan memperkuat integrasi mereka ke masyarakat.

Kolaborasi antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Payakumbuh dan PKBM Genemail memperlihatkan adanya kesamaan visi dan tujuan yang kuat, yaitu menghadirkan pendidikan yang layak, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh anak binaan. Kedua pihak tidak menunjukkan adanya perbedaan kepentingan, karena sama-sama menempatkan pendidikan anak sebagai prioritas utama di atas pertimbangan lain. Keselarasan visi ini menjadi fondasi yang memperkuat hubungan kerja sama, menciptakan kepercayaan timbal balik, sebagaimana ditegaskan oleh Ansell & Gash (2008) bahwa kepercayaan dalam suatu kolaborasi tumbuh melalui pengalaman bersama, konsistensi tindakan nyata, dan kesesuaian arah tujuan. Komitmen terhadap proses (*commitment to process*) juga tercermin dalam praktik kolaborasi sehari-hari; pihak LPKA secara responsif menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan

peserta didik dengan menyusun jadwal piket pengawas untuk menjaga kedisiplinan, sementara PKBM tetap melaksanakan program pendidikan meskipun tidak memperoleh honor tetap dan bantuan keuangan dari LPKA yang bersifat tidak menentu. Kondisi ini memperlihatkan kesungguhan kedua pihak dalam menjalankan setiap tahap kerja sama secara konsisten dan penuh tanggung jawab, sehingga program pendidikan bagi anak binaan tidak hanya dapat terus berlangsung, tetapi juga semakin mengakar sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.

Pemahaman bersama (*shared understanding*) antara LPKA Kelas II Payakumbuh dan PKBM Genemail terbangun dengan sangat kuat, ditandai oleh kesamaan visi bahwa setiap anak binaan, tanpa terkecuali, berhak memperoleh pendidikan dan keterampilan sebagai bekal masa depan. Kesepahaman ini tidak hanya berhenti pada tataran gagasan, tetapi juga diwujudkan melalui kesepakatan konkret, seperti kewajiban seluruh anak binaan untuk mengikuti kegiatan belajar meskipun terdapat hambatan administratif, misalnya tidak terdaftar dalam sistem Dapodik sehingga ijazah formal tidak dapat diterbitkan.

Kendati demikian, kedua pihak tetap berkomitmen menjaga kesinambungan proses pembelajaran, karena esensi dari pendidikan yang diberikan bukan semata-mata pada sertifikasi, melainkan pada peningkatan kapasitas dan pengetahuan anak binaan. Hal ini memperlihatkan bahwa kolaborasi mereka benar-benar berlandaskan pemahaman bersama mengenai tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Lebih jauh, keberlanjutan kerja sama ditegaskan melalui kesepakatan bahwa kolaborasi hanya dapat terhenti dalam situasi darurat, seperti bencana alam, yang berada di luar kendali manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman bersama ini menjadi modal penting dalam memastikan keberlangsungan kolaborasi jangka panjang, sekaligus mencerminkan konsistensi kedua pihak dalam menempatkan pendidikan anak binaan sebagai prioritas utama.

Dari sisi *intermediate outcomes*, kolaborasi antara LPKA Kelas II Payakumbuh dan PKBM Genemail telah menunjukkan capaian berupa *small wins* yang cukup signifikan dan menjadi indikator keberhasilan jangka menengah. Salah satu capaian penting adalah keterlibatan aktif anak binaan dalam mengikuti kegiatan sekolah sesuai dengan kelompok umur masing-masing, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih terstruktur layaknya peserta didik pada umumnya. Anak binaan juga menerima penilaian akademik melalui rapor setiap semester, yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk evaluasi formal, tetapi juga menjadi motivasi bagi mereka untuk terus meningkatkan prestasi. Proses pembelajaran dirancang secara khusus dengan pendekatan psikomotorik serta melalui sistem kelas gabungan, di mana anak binaan dari jenjang paket pendidikan yang lebih tinggi berperan membimbing peserta dari jenjang lebih rendah. Pola ini tidak hanya memperkuat transfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepemimpinan, dan solidaritas di antara anak binaan. Salah satu inovasi besar yang lahir dari kerja sama ini adalah penerapan kurikulum khusus bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), yang

menjadikan LPKA Payakumbuh sebagai salah satu dari delapan lembaga percontohan (*pilot project*) tingkat nasional di Indonesia.

Kehadiran kurikulum ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, melainkan berkembang menjadi upaya sistematis untuk membangun model pendidikan yang adaptif dengan kondisi khusus anak binaan. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan, kedua pihak juga menyelenggarakan forum komunikasi rutin setiap tiga bulan sekali yang digunakan sebagai wadah evaluasi bersama, perumusan strategi lanjutan, serta penyesuaian program berdasarkan kendala dan perkembangan terbaru.

Selain aspek kurikulum dan evaluasi, kejelasan pembagian tugas antara LPKA dan PKBM turut menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, sehingga setiap pihak dapat fokus pada peran utamanya masing-masing. Dukungan materiil pun tidak diabaikan, misalnya dengan adanya program beasiswa bagi anak binaan dari keluarga kurang mampu, penyediaan fasilitas literasi, hingga pengembangan *e-library* yang memperluas akses anak terhadap sumber pengetahuan digital.

Semua *small wins* ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi tidak hanya mengatasi hambatan administratif dan finansial, tetapi juga mendorong inovasi berkelanjutan. Hal yang tidak kalah penting adalah komitmen tinggi dari PKBM Genemail, yang tetap melanjutkan program pendidikan meskipun tidak memperoleh imbalan finansial tetap dari pihak LPKA. Sikap ini menunjukkan bahwa orientasi utama dari kerja sama bukanlah keuntungan material, melainkan keberlangsungan pendidikan anak binaan sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *intermediate outcomes* yang telah dicapai tidak hanya memperkuat kepercayaan antar lembaga, tetapi juga meneguhkan posisi kolaborasi ini sebagai model praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan pemasyarakatan anak.

Outcome dari kolaborasi antara LPKA Kelas II Payakumbuh dan PKBM Genemail menunjukkan dampak nyata yang signifikan, terutama pada pemenuhan hak pendidikan anak binaan yang sejalan dengan prinsip *Beijing Rules* dan Piagam Archamanik. Melalui kolaborasi ini, anak binaan memperoleh akses pendidikan yang layak dan setara dengan peserta didik pada umumnya, sehingga mereka dapat tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Penerbitan ijazah resmi yang diakui setara dengan pendidikan formal semakin memperkuat capaian tersebut, karena memberi legitimasi akademik yang memungkinkan anak binaan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan masa pembinaan. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan di dalam LPKA tidak sekadar bersifat simbolis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan jembatan menuju reintegrasi sosial.

Selain itu, kolaborasi ini juga memberikan dampak yang luas terhadap citra institusional LPKA di mata masyarakat. LPKA tidak lagi dipersepsikan hanya sebagai lembaga pemidanaan, melainkan sebagai institusi yang menjalankan fungsi pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak. Keberhasilan dalam

menyelenggarakan pendidikan bersama PKBM Genemail memperlihatkan komitmen negara dalam menyiapkan anak berkonflik dengan hukum agar kembali menjadi individu yang produktif dan mampu berkontribusi positif di lingkungan sosialnya. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya berhasil menghadirkan manfaat langsung bagi anak binaan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan moral LPKA sebagai lembaga yang humanis dan berorientasi pada masa depan. Model kerja sama semacam ini dapat dijadikan inspirasi sekaligus praktik baik (*best practice*) yang relevan untuk direplikasi di LPKA lain di Indonesia.

Kendala Dalam Program Pendidikan Kesetaraan di LPKA Payakumbuh

Program pendidikan kesetaraan di LPKA Kelas II Payakumbuh tidak berjalan tanpa hambatan, melainkan menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan aspek administratif, persepsi pihak luar, serta koordinasi antar lembaga. Salah satu persoalan paling krusial terletak pada keterbatasan administrasi, khususnya terkait pendaftaran anak binaan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Tidak semua anak binaan dapat tercatat secara resmi karena status keanggotaan mereka di sekolah asal belum dicabut, sehingga menimbulkan tumpang tindih administrasi. Kondisi ini berdampak serius, sebab meskipun anak binaan aktif mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran di LPKA, mereka berisiko tidak memperoleh ijazah yang diakui secara nasional.

Situasi tersebut berpotensi menurunkan motivasi belajar anak, sekaligus mengurangi nilai strategis program kesetaraan sebagai sarana untuk memastikan hak pendidikan anak binaan terpenuhi secara setara dengan anak-anak di luar lembaga pasyarakatan. Di luar persoalan administratif, kendala lain muncul dari persepsi sebagian orang tua yang masih memandang sebelah mata program pendidikan kesetaraan. Beberapa orang tua lebih memilih agar anaknya kembali ke sekolah formal setelah menyelesaikan masa pembinaan, bahkan ada yang secara langsung melarang anak mengikuti kegiatan belajar di LPKA. Pandangan semacam ini memperlihatkan bahwa dukungan keluarga yang idealnya menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pendidikan anak masih belum sepenuhnya optimal. Minimnya dukungan keluarga juga berimplikasi pada proses reintegrasi sosial anak setelah keluar dari LPKA, karena pendidikan yang diperoleh kurang mendapat pengakuan dan legitimasi dari lingkungan terdekat.

Selain menghadapi kendala administratif dan persepsi orang tua, faktor finansial juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di LPKA. Efisiensi anggaran pemerintah berdampak langsung terhadap proses finalisasi kurikulum pendidikan kesetaraan yang telah disusun secara sistematis. Meski kurikulum tersebut sudah berada pada tahap akhir penyelesaian, keterbatasan dana membuat pengesahannya tertunda, sehingga implementasi penuh dari program ini belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan pendidikan anak binaan masih sangat rentan terhadap kebijakan fiskal negara, yang pada gilirannya membatasi ruang gerak lembaga dalam melakukan inovasi maupun

pengembangan layanan pendidikan. Hambatan finansial juga tercermin pada keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana belajar, mulai dari buku, alat tulis, hingga fasilitas pendukung lainnya.

Dalam praktiknya, ketersediaan fasilitas ini sering kali tidak memadai, dan bahkan pada beberapa kesempatan disalahgunakan atau dirusak oleh anak binaan. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan sistem pengawasan yang lebih baik, sekaligus edukasi mengenai tanggung jawab dan kepemilikan sarana belajar agar fasilitas yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain faktor material, aspek psikososial anak binaan turut memengaruhi efektivitas program. Motivasi belajar sebagian anak masih rendah karena minimnya dukungan keluarga dan lemahnya interaksi emosional dengan orang-orang terdekat. Tidak sedikit anak yang mengikuti kegiatan pendidikan hanya sebagai formalitas, tanpa adanya partisipasi aktif yang sungguh-sungguh. Rendahnya dukungan keluarga memperparah kondisi ini, karena anak binaan kerap merasa terasing dan tidak memperoleh dorongan moral yang mereka butuhkan untuk bertahan dalam proses belajar. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program pendidikan di LPKA tidak cukup hanya ditopang oleh ketersediaan fasilitas dan kelengkapan kurikulum, tetapi juga menuntut perhatian serius terhadap kebutuhan psikososial anak.

Faktor internal yang bersumber dari lingkungan LPKA juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. Salah satu hambatan yang cukup menonjol adalah rasa kurang aman yang dirasakan tenaga pendidik, khususnya guru perempuan, ketika berinteraksi dengan anak binaan. Latar belakang pidana sebagian anak sering kali menimbulkan potensi risiko, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis, yang berpengaruh terhadap rasa percaya diri guru dalam mengelola kelas. Kondisi ini menimbulkan rasa waswas yang berdampak langsung pada kualitas interaksi belajar mengajar, karena guru cenderung lebih berhati-hati sehingga proses pembelajaran menjadi kurang dinamis. Tantangan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan di LPKA memerlukan dukungan sistem keamanan dan pendampingan yang lebih intensif agar tenaga pendidik dapat bekerja dalam suasana aman dan nyaman.

Selain itu, perilaku anak binaan yang tidak tertib, seperti mengganggu jalannya pelajaran atau menunjukkan sikap apatis terhadap kegiatan belajar, turut mengurangi efektivitas pembelajaran. Situasi ini tidak hanya mengganggu konsentrasi guru, tetapi juga memengaruhi motivasi dan keterlibatan anak binaan lain yang sebenarnya bersemangat untuk belajar. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan disipliner yang tepat, yakni metode yang tidak sekadar menekankan hukuman, tetapi juga mengintegrasikan unsur edukatif, motivasional, dan pembiasaan positif. Di samping itu, pengaturan lingkungan belajar yang kondusif juga menjadi faktor kunci, sebab ruang belajar yang aman, tertib, dan terstruktur dapat meningkatkan konsentrasi anak binaan sekaligus meminimalkan potensi konflik. Dengan demikian, meskipun program pendidikan di LPKA Payakumbuh telah berjalan cukup baik dan terstruktur, keberhasilan implementasinya tetap

bergantung pada koordinasi antar lembaga, dukungan finansial yang memadai, keterlibatan aktif anak binaan, serta keamanan dan kenyamanan tenaga pendidik. Apabila seluruh faktor tersebut dapat dikelola secara optimal, maka tujuan utama program pendidikan kesetaraan, yakni memberikan kesempatan belajar yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi anak binaan, dapat tercapai secara lebih efektif.

SIMPULAN

Kesimpulan, pemenuhan hak pendidikan anak binaan di LPKA Kelas II Payakumbuh dapat berjalan efektif melalui kerja sama dengan PKBM Genemail, yang menyediakan tenaga pendidik profesional untuk membantu anak putus sekolah. Program ini bermanfaat bagi LPKA dalam mendukung pembinaan karakter, memastikan hak pendidikan terpenuhi, dan membangun citra positif, sekaligus bagi PKBM untuk memperluas akses pendidikan meskipun tanpa honor tetap, dengan dukungan pendanaan dari Dinas Pendidikan dan bantuan situasional dari LPKA. Pelaksanaan program diatur melalui MoU, pembagian peran yang jelas, serta forum komunikasi rutin dan informal untuk evaluasi dan koordinasi, yang memperkuat kepercayaan dan keterbukaan dalam kerja sama. Meskipun forum komunikasi belum sepenuhnya eksklusif dan pembagian peran masih menunjukkan ketimpangan, kerja sama ini terbukti efektif dalam mendukung pendidikan dan rehabilitasi anak binaan, mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan bekal ilmu dan keterampilan yang memadai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Amelia, N. S., & Priambodo, B. (2024). Mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya melalui perspektif collaborative governance. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(3), 330-344.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Aprianto, R., Purnawati, A., & Syah, K. (2021). Implementasi program pembinaan anak didik masyarakat pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 321-329.
- Apriliani, H., Pawitan, G., & Suratman, P. (2023). Systematic literature review: Analisis collaborative governance dalam program Adiwiyata sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 24(2), 36-54.
- Argita, A., Gunawan, C., Risnawati, R., Syahrini, S., & Nasir, N. (2021). Manajemen pembelajaran: Program belajar anak binaan di Lapas Anak Kota Kendari. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(2), 121-128.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Sampul collaborative governance. Collaborative Governance dalam Perspektif Publik.*

- Cynthia, R. E., & Sihotang, H. (2023). Melangkah bersama di era digital: Pentingnya literasi digital untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 31712–31723.
- Doris, R., & Santoso, B. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum*, 3.
- Fiantika, W. M., Jumiyati, H., Wahyuni, J., & Honesti, E. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Hamid, S., & Rusmawan, T. (2022). Peran pendidikan dalam penguatan kriminologi hukum (strategi pencegahan dan rehabilitasi tindak pidana). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 17145–17155.
- Kamil, M. (2007). Kompetensi tenaga pendidik pendidikan nonformal dalam membangun kemandirian warga belajar. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 2(2), 11–20.
- Lian, B., & Amiruddin. (2021). Peran pendidikan dalam menciptakan SDM berkualitas di era disrupsi dan pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional PGRI Provinsi Sumatra Selatan dan Universitas PGRI Palembang*, 12–15.
- Maharidho, D. Z., & Subroto, M. (2022). Optimalisasi kegiatan pendidikan sebagai pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Tanjung Pati. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 124–131.
- Mitro Subroto, & Zidan, F. (2024). Pelaksanaan hak pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 5(1), 45–58.
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi narapidana untuk mengurangi tingkat residivis. *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438.
- Mustafa, P. S. E. A. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian tindakan kelas dalam pendidikan olahraga* (1st ed.). Insigh Mediatara.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative governance: Suatu tinjauan teori dan praktik*. Bildung.
- Nurkholis. (2013). Pendidikan dalam upaya memajukan teknologi. *Jurnal Doktor Ilmu Pendidikan*, 1(1), 24–44.
- OECD. (2022). *Education at a Glance 2022: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/69096873-en>
- Pahleviannur, M. R., et al. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Kollegial Supervision.
- Rahma, D., & Irwansyah. (2024). Analisis hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak di Kota Medan. *Grondwet*, 3(2), 31–43.
- Rajaloea, N. I., Umar, S. H., & Yasim, S. (2023). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam membina peserta didik yang putus sekolah: Studi kasus di PKBM Mario Laha Kota Ternate Utara. *GeoCivic Jurnal*, 6(1), 43–52.
- Setyorini, A., & Asiah, S. (2022). Konsep pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara. *Turats*, 14(2), 71–99.
-

-
- Sodik, A. J., Santoso, G., Supatmi, & Winata, W. (2023). Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi efektif untuk kesepakatan bersama di kelas 4. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 4(4), 395–420.
- Taufiqurokhman, T., Satispi, E., Murod, M., Izzatusholekha, I., Andriansyah, A., & Samudera, A. A. (2023). Kebijakan pemerintah memajukan kualitas sumber daya manusia unggul. *Swatantra*, 21(2), 189–200.
- Tohani, E., & Suharta, R. (2023). Kemitraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam pengelolaan pendidikan nonformal di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 18(1), 45–56.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2022). *The state of the world's children 2021: On my mind – Promoting, protecting and caring for children's mental health*. UNICEF.
- Wirawan, R., & Dwimawanti, I. H. (2019). Kualitas pelayanan pendidikan anak binaan di Lembaga Kelas I Kutoarjo. *Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 14–25.
- World Bank. (2023). *World development report 2023: Learning and inclusion*. World Bank.
- Zaifullah, Z., Cikka, H., Kahar, M. I., Ismail, M. J., & Iskadar, I. (2023). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di era Society 5.0. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 14539–14549.